

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perubahan paradigma peranan pemerintah dari power menjadi empowerment telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional, mengingat tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif.

Kabupaten Barito Kuala terdapat wilayah yang menjadi kawasan pertumbuhan cepat yakni kawasan Handil Bakti khususnya dan Kecamatan Alalak pada umumnya. Potensinya yaitu mempunyai aksesibilitas tinggi menyebabkan aktifitas ekonomi yang meningkat yang pada akhirnya memberikan dorongan pada penduduk untuk berdomisili di kawasan tersebut.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana (pengembang/developer) akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala local untuk melayani penduduk setempat, juga berkembang pula kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Sebagai salah satu wilayah kecamatan dari Kabupaten Barito Kuala, saat ini Kecamatan Alalak terus berbenah di segala bidang, karenanya Kecamatan Alalak selalu berupaya melakukan percepatan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan terkait.

1.2 Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 63 disebutkan :”Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Beberapa peraturan perundangan yang mempunyai keterkaitan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, yaitu :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025**
5. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**
6. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
7. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.**
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;**
13. **Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.**
14. **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.**

Peraturan Daerah ini merupakan salah satu acuan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
15. **Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala.**

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

16. **Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala tahun 2012-2031.**
17. **Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;**
18. **Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.**
19. **Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;**
20. **Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.**
21. **Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/265/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.**

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah agar tersedia perencanaan resmi yang merupakan langkah sistematis dengan menyesuaikan tuntutan pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya akan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kecamatan Alalak pada periode yang ditentukan.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai salah satu dokumen perencanaan SKPD, juga sebagai pedoman, strategi, tujuan dan sasaran serta untuk mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah terpilih yang akan dicapai selama tahun 2017-2022, dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama lima tahun kedepan. Dengan demikian maka Renstra SKPD merupakan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan SKPD selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP daerah dan RPJM daerah agar hasil dapat dipertanggungjawabkan sekaligus dan akan mempermudah pelaksanaan program yang ditetapkan dalam renstra itu sendiri.

Adapun sistematika penulisan sesuai surat edaran menteri dalam negeri diatas disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Alalak
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Alalak
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Alalak
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Alalak

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kabupaten Barito Kuala
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Alalak
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Alalak
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN ALALAK

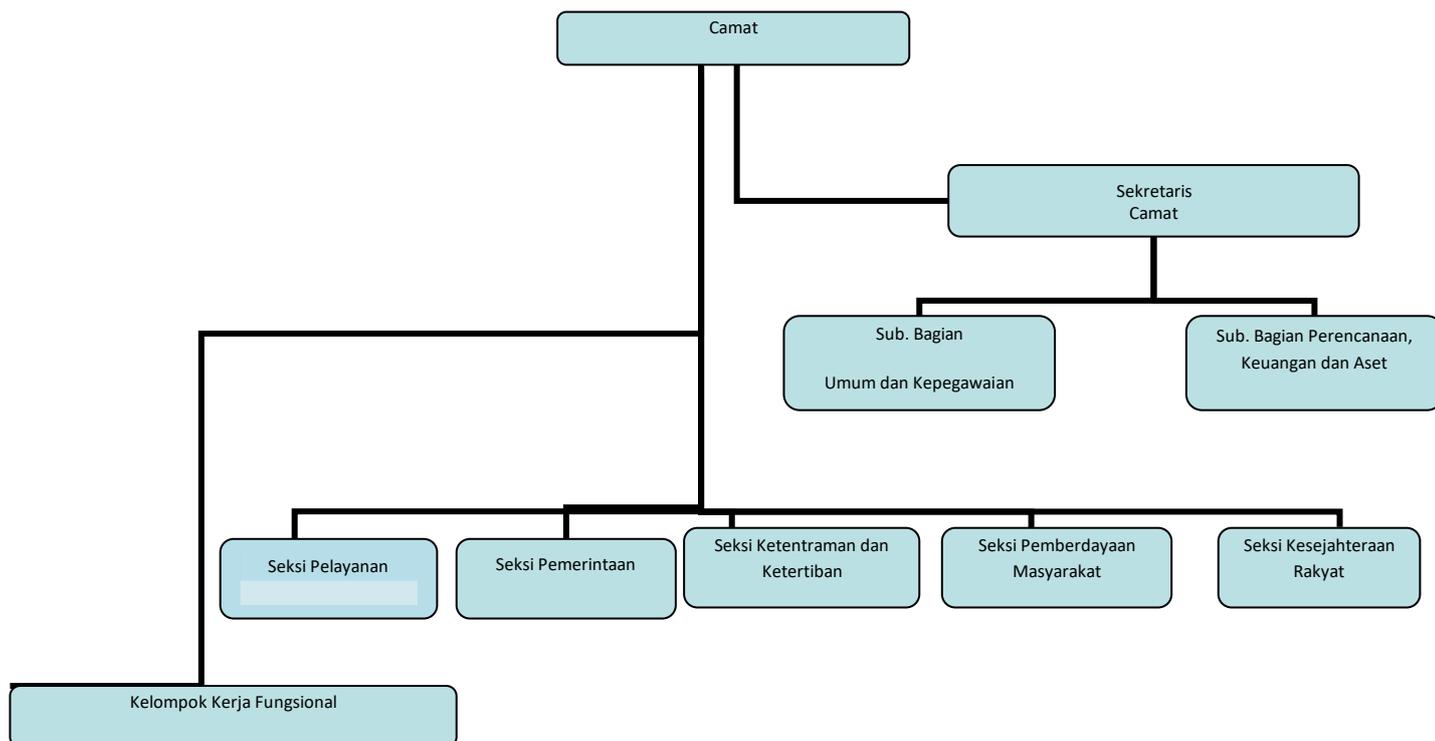
2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Kecamatan Alalak

2.1.1 Kecamatan mempunyai tugas ;

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2 Fungsi Kecamatan Alalak adalah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan ketertiban umum membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Struktur organisasi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada bagan organisasi kecamatan alalak kabupaten barito kuala sebagai berikut :



Adapun susunan kepegawaian dan perlengkapan yang ada pada Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan alalak adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemerintahan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok jabatan fungsional

2.2 Sumber Daya Kecamatan Alalak

Kecamatan Alalak merupakan bagian atau salah satu Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang terletak dengan perbatasan Kota Banjarmasin dengan pemerintahan kabupaten Barito Kuala, mempunyai penduduk sebesar 60.492 jiwa dengan luas wilayah 106.85 KM² dan merupakan daerah pasang surut yang mempunyai ketinggian $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dibawah permukaan laut.

Luas wilayah Kecamatan Alalak adalah 106.85 km² yang terdiri dari 15 (lima belas) desa dan 3 (tiga) Kelurahan, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kecamatan Takisung, Jorong, Pelaihari, Kurau, Bati Bati di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, **Kecamatan Alalak**, Barambai, Tabunganen, Tamban, Anjir Pasar, Anjir Muara, Mandastana, Cerbon, dan Kecamatan Kuripan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras utara, Binuang, Tapin Selatan, Tapin utara, Tapin Tengah dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin dan Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Tanta, Tanjung, Haruai dan Kecamatan Muara Uya di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pulau Sebuku, Kusan Hilir, Satui, Kusan hulu, Batulicin, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Utara di Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Baru Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Adapun letak wilayah Kecamatan Alalak berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Belawang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Banjarmasin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mandastana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Mekarsari

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Alalak adalah petani sawah dan kebun, Pedagang, Karyawan Industri/pegawai dan lain-lain. Potensi wilayah adalah Pertanian dan Perkebunan, selain penghasil padi, bidang perkebunan yang paling menonjol adalah perkebunan Jeruk, mangga dan rambutan serta bidang Pariwisata meliputi Tempat Wisata Pulau Kembang, Pulau Bakut dan Jembatan Barito.

Kecamatan Alalak terdiri dari 15 (lima belas) desa, yaitu :

1. Desa Pulau Sugara
2. Desa Pulau Sewangi
3. Desa Pulau Alalak
4. Desa Semangat Karya
5. Desa Semangat Bakti
6. Desa Semangat Dalam
7. Desa Tatah Mesjid
8. Desa Berangas Timur
9. Desa Sungai Lumbah
10. Desa Beringin
11. Desa Sungai Pitung
12. Desa Belandean Muara
13. Desa Belandean
14. Desa Panca Karya
15. Desa Tanjung Harapan

Serta ada 3 (tiga) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Handil Bakti
2. Kelurahan Berangas Barat
3. Kelurahan Berangas

Adapun Kondisi Sumber Daya Pegawai kecamatan Alalak dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- a. Data Pegawai Kantor kecamatan

Untuk jumlah pegawai, jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Pegawai Kantor Kecamatan Alalak

No.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	M. Haris Isroyani, S.Sos	197009301991011002	IV/b	Camat
2	Sudiarti, S.Sos	196509261986022003	IV/a	Sekretaris Camat
3	Hj. Rusmawardah, S.Sos	196211221982012007	III/d	Kasi Kesra
4	M. Ishak Hasan	196206151986021005	III/d	Kasi Trantib
5	Rahmatiah, S.Sos	197005251990022003	III/c	Plt. Kasi PM
6	Sakla Nursyitah	196601241995032002	III/c	Kasubbag Kepegawaian
7	Dewi Astuti, S.AB	198209222006042010	III/b	Plt.Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset
8	Erika Levida	198307082009042004	III/a	Pengadministrasi Keuangan
9	Naliana Fisha Sanjaya, A.Md	196901272010011001	III/a	Pengurus Barang
10	Rr. Ina Yohana Merdekawati, A.Md	198208192005012914	III/a	Penyimpan Barang
11	Noor Kasiani	196203051986022003	III/a	Pengadministrasi Pemerintahan
12	Bainah	196405271988112011	II/d	Pengadministrasi Kesra
13	Heri Iswandi	197301022007011016	III/c	Pengadministrasi Kesra
14	Susana	198409052009022014	II/c	Pengadministrasi Kependudukan
15	Patmawati	198509122009022014	II/c	Operator SIAK
16	Parngadi	197306042009061008	II/c	Bendahara Penerimaan
17	Murjani	196502232007011015	II/a	Pengelola Data Trantib

18	Budiatsyah	196701082014061001	I/d	Petugas Keamanan
19	Junaidi	197706242005011005		Pol PP
20	Rahmansyah	THL		Petugas Administrasi Kantor
21	M. Rihki Doni Harianto	THL		Penjaga Malam Kantor
22	Sya'diyah	THL		Petugas Kebersihan

2.2.1. Camat

PERAN JABATAN :

Membantu Bupati dalam melaksanakan/menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ketertiban umum membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa.

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi pokok dan fungsi kecamatan;
- b. Melaksanakan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan;
- c. Mengendalikan perencanaan, pemamfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan;
- d. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagai wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- e. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan ;
- f. Menetapkan program, kegiatan standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagai wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja sebagai pegawai, selaku individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa;
- h. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada bupati dalam pelaksanaan sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- i. Mengevaluasi dan menilai secara periodic hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi;
- j. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan;

2.2.2 Sekretariat Kecamatan

PERAN JABATAN :

Membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan lintas internal dilingkup kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi dilingkungan kecamatan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan bagian perencanaan, keuangan dan asset
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan bagian umum dan kepegawaian.
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan
- f. Membina dan mengevaluasi bahan penyusunan laporan akuntabilitas kecamatan
- g. Mengevaluasi bahan penyusunan program dan rencana kerja pada subbag umum dan kepegawaian, dan subbag perencanaan, keuangan dan asset

2.2.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

PERAN JABATAN :

Membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dibidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi dilingkungan kecamatan

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk untuk tertib administrasi.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan surat keluar untuk tertib administrasi
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan organisasi dan tatalaksana berupa analisis jabatan dan struktur organisasi kecamatan
- g. Mengkoordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai (Diklat, Bimtek, Kunker)
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan laporan absensi pegawai

- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian berupa usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, izin tidak masuk kerja dan cuti
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan penyusunan data kepegawaian berupa daftar nominatif pegawai, daftar jaga naik pangkat dan berkala, formulir isian pegawai (FIP), daftar piket
- k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada subbag umum dan kepegawaian

2.2.1.2 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

PERAN JABATAN :

Membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dibidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi dilingkungan kecamatan.

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Subbag Perencanaan Keuangan dan Aset.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kecamatan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan perencanaan berupa rencana awal dan akhir kecamatan
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi fisik kecamatan.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan asset kecamatan
- g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada subbag perencanaan, keuangan dan asset

2.2.3. Seksi pelayanan

PERAN JABATAN :

Memimpin dan melaksanakan tugas camat dalam bidang pelayanan dalam hal pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi dibidang pelayanan perizinan dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan diwilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten , meliputi urusan rekomendasi pembuatan KTP, kartu keluarga, Akta Catatan Sipil, rekomendasi izin mendirikan bangunan, HO dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pelayanan.
- b. Mengonsep rekomendasi IMB Perumahan berdasarkan procedure dan pedoman kerja untuk kelancaran tugas.
- c. Mendisposisi pembuatan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan procedure dan pedoman kerja untuk kelancaran tugas.
- d. Membuatkan pengantar pembauatan KTP dan Akta Catatan Sipil procedure dan pedoman kerja untuk kelancaran tugas.
- e. Mengonsep rekomendasi ijin lokasi, surat ijin tempat usaha (SITU) dan tanda daftar perusahaan (TDP) berdasarkan procedure dan pedoman kerja untuk kelancaran tugas.
- f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional dibidang pelayanan.
- g. Mengonsep laporan dibidang pelayanan sesuai procedure dan pedoman kerja untuk kelancaran tugas.
- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan.

2.2.4 Seksi pemerintahan

PERAN JABATAN :

Membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis,dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi dibidang pemerintahan. Dan juga menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintaha di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupten,meliputi urusan pemerintah desa, statistic, persediaan dan kearsipan.

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemerintahan.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perencanaan dan pengembahangan kegiatan pemerintahan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan dan keagrariaan.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan legalisasi mengenai permasalahan pemerintahan.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembentukan, penghapusan, perubahan tata batas, nama desa/kelurahan dan pengembangannya.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pertimbangan, rekomendasi dan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi desa/kelurahan.

- k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemerintahan.

2.2.5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

PERAN JABATAN :

Membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi dibidang ketentraman dan ketertiban serta menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan diwilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi ketentraman dan ketertiban.

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyelesaian konflik dan perselisihan antar penduduk, kelompok dan desa.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan gangguan keamanan tingkat kecamatan.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan ideologi, sosial politik dan kesadaran bermasyarakat.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Izin Penelitian di Wilayah Kecamatan
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan Linmas desa/kelurahan
- j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

2.2.6 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

PERAN JABATAN :

Membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan juga menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan diwilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pekerjaan umum dan penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, komunikasi dan informatika, tenaga kerja, ketahanan pangan, lingkungan hidup, badan usaha milik desa dan bulan

bakti gotong royong, koperasi dan usaha kecil menengah perdagangan, penanaman modal, perikanan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat..
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, sarana ekonomi dan produksi, unit koperasi, sarana prasarana perhubungan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis permasalahan pembangunan masyarakat desa dibidang perekonomian,perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.(fasilitasi penyusunan APBDesa,fasilitasi kegiatan peningkatan aparatur/perangkat desa,pembinaan perkembangan desa).
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

2.2.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat

PERAN JABATAN :

Membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis,dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi dibidang kesejahteraan rakyat.Dan menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan diwilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, transmigrasi dan perpustakaan..

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan kesejahteraan rakyat, yaitu kegiatan MTQ dan Raskin.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (MTQ,Pelatihan Ustadz,Lokakarya Mini Puskesmas,Monitoring Raskin).

- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi bantuan sosial dan bencana alam.
- e. Mengkoordinir pembuatan surat keterangan mutasi penduduk dan laporan kependudukan.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan pemberian rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Nikah, Dispensasi Nikah dan Pelayanan Pendaftaran BPJS Mandiri.
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Hubungan kerja kecamatan dengan kepala daerah bersifat hierarki, meliputi :

1. Hubungan kerja kecamatan dengan SKPD bersifat tidak langsung dan non hierarki.
2. Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
3. Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertical dibawah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
4. Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitas.
5. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

Kinerja Kecamatan Alalak memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala.yang meliputi:

1. Pelayanan Perizinan meliputi:
 - a. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil.
 - b. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan meliputi:
 - a. Pelayanan KTP,
 - b. Surat Pindah Antar Desa , Antar Kecamatan,
 - c. Rekomendasi Surat Tidak mampu,
 - d. Surat dispensasi Nikah,
 - e. Rekomendasi pencairan ADD dan DD,
 - f. Register Surat Tanah.
 - g. Surat Keterangan Usaha
 - h. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Sedangkan tingkat capaian kinerja kecamatan Alalak selama tahun 2017 pada sekretariat masing-masing sub bagian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada sekretariat

1) Capaian program pelayanan administrasi perkantoran

- Tunjangan hasil capaian, terbayarnya Tunjangan Daerah pegawai Kecamatan Alalak.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian, terfasilitasinya pelayanan surat menyurat.
- Kegiatan Penyediaan jasanya sumber daya air dan listrik hasil capaian, tersedianya layanan, air bersih dan listrik.
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpenuhinya layanan pajak kendaraan dinas.
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan hasil capaian yakni terpeliharanya kebersihan kantor.
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian terpenuhinya keperluan alat tulis kantor kecamatan
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya cetak keperluan kantor dan penggandaan berkas atau dokumen lainnya.
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dengan capaian terpenuhinya perlengkapan instalasi listrik kantor.
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian terpenuhinya langganan bahan bacaan Koran
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan capaian tersedianya makan dan minum rapat, harian dan rapat koordinasi di kantor kecamatan Alalak.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah.

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yakni terbayarnya jasa pemeliharaan/ jaga malam selama 1 tahun
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional yakni terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 7 unit.

- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak buah.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor dengan capaian terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 7 buah

3) Capaian Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan dengan capaian telah di ikutinya bimtek sebanyak 3 kali.

b. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Trantib

4) Capaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Kegiatan Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan capaian Terjaganya keamanan secara Kondusif wilayah Kecamatan Alalak.

c. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Pemerintahan

5) Capaian Program Peran Serta Kepemudaan

- Pelaksanaan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus dengan capaian telatihnnya 30 orang anggota paskibraka tingkat kecamatan.

d. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

6) Capaian Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

- Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dengan capaian telah dikutinya pameran pembangunan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala

7) Capaian Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan capaian tersuluhnya 200 orang ibu-ibu rumah tangga dan perempuan.

8) Capaian Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes dengan capaian di monitoring dan di evaluasinya laporan APDes pada 15 desa.

9) Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan hasil capaian, memberikan Partisipasi Kepada Masyarakat untuk bermusyawarah dalam Pembangunan Daerah Pembangunan Desa.

e).Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat

10) Capaian Program Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama

- Kegiatan MTQ Tingkat kabupaten dengan capaian terkirimnya 35 orang kafilah dari kecamatan Alalak.
- Kegiatan Karang Taruna dengan capaian 20 orang peserta

Tabel. 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (RP)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama 1																	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	54.847.500	101.025.000	104.309.000	75.520.000	101.570.000	54.847.500	81.125.000	101.590.000	72.890.000	96.560.000	100	80,30	97,39	96,52	95,07	18.877.875	4,32%
Kinerja Utama 2																	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54.847.500	101.025.000	104.309.000	75.520.000	101.570.000	54.847.500	81.125.000	101.590.000	72.890.000	96.560.000	100	80,30	97,39	96,52	95,07	18.877.875	4,32%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Alalak

Adapun tantangan yang dihadapi kecamatan Alalak dalam melakukan pelayanan antara lain adalah :

- 1) Kecamatan Alalak yang merupakan daerah rawa berdampak terhadap tingginya anggaran yang harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
- 2) Masih terdapat wilayah perdesaan yang belum mendapat pelayanan air bersih perpipaan. Daerah tersebut masih dilayani pelayanan air bersih non perpipaan.
- 3) Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih kurang.
- 4) Produktivitas lahan pertanian kecamatan Alalak belum maksimal meskipun secara umum produksi pertanian Kabupaten Barito Kuala khususnya padi adalah terbesar di Kalimantan Selatan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut Kecamatan Alalak tentunya mempunyai peluang dalam usaha mengembangkan pelayanannya, peluang itu antara lain adalah :

- 1) Kecamatan Alalak menjadi kawasan pertumbuhan cepat yakni kawasan Handil Bakti khususnya dan Kecamatan Alalak pada umumnya yang mempunyai aksesibilitas tinggi dan posisi yang strategis menyebabkan aktifitas ekonomi yang meningkat yang pada akhirnya memberikan dorongan pada penduduk untuk berdomisili di kawasan tersebut.
- 2) Bersama dengan kecamatan Mandasatana, Anjir Muara, Tamban dan Tabunganen kecamatan Alalak sebagai penyangga pertumbuhan Kota Banjarmasin di kabupaten Barito Kuala.
- 3) Sungai Barito menjadi jalur pelayaran utama menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, transportasi hasil tambang dan perkebunan serta menyimpan potensi yang besar untuk usaha budidaya perikanan.
- 4) Mempunyai jumlah penduduk terbesar di kabupaten Barito Kuala sehingga mempunyai serapan pajak serta potensi SDM yang tentunya lebih besar untuk pembangunan selanjutnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ALALAK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Di Kecamatan Alalak

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Alalak yaitu Kecamatan Alalak merupakan daerah rawa sehingga memerlukan anggaran yang lebih dalam pembangunan infrastruktur dan permasalahan lainnya yang tertuang dalam point 2.4 diatas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang tertuang di dalam RPJMD merupakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah :

”BARITO KUALA SETARA” TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA – MENATA KOTA BERSAMA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA.

Visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala ini diharapkan akan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional, selaras dengan RPJM Nasional 2009-2014, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2010 - 2014 dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025. “Satu Kata” dimaknai sebagai kebulatan tekad pemimpin dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan usaha bersama, semaksimal mungkin guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. “Maju” dapat diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat, yang pada titik tataran tertentu menjadi “lebih baik” dari pada kondisi sebelumnya atau menjadi “lebih baik” jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat di wilayah lain. “Mandiri” merupakan kondisional masyarakat yang tercipta akibat adanya perlakuan dan kebijakan pembangunan, yang diindikasikan antara lain adanya peningkatan usaha masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, di sektor primer maupun skunder pada berbagai bidang pembangunan. Berdaya saing dimaknai sebagai suatu “kemampuan lebih” yang dimiliki masyarakat jika dibandingkan dengan kemampuan masyarakat lainnya. Hal ini disebut “keunggulan komparatif”. Sejahtera adalah kondisional “yang baik” untuk individu dan masyarakat yang bersifat “relative”.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambang Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kualadan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang "BAHALAP" yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

Dalam mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tentunya ditunjang oleh misi yang mendukungnya. Misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah "SETARA" :

1. Mengintegrasikan infrastruktur wilayah yang mendukung kemandirian desa dan penataan kota;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui inovasi teknologi berbasis pertanian;
3. Meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan, kesehatan dan profesionalitas Sumber Daya Manusia;
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.

Tentunya misi tersebut harus didukung oleh setiap SKPD agar arah pembangunan dapat terarah dengan baik. Untuk itu kecamatan Alalak mengacu pada misi 4 yaitu *Memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani*.

3.3. Telaahan Renstra Kabupaten Barito Kuala

SKPD Kecamatan Alalak berdasarkan telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri mengacu kepada renstra Kemendagri sedangkan SKPD Kecamatan Alalak mengacu kepada renstra SKPD Setda Provinsi.

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan strategi untuk mencapai tujuan.

STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN :

Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)

Selain misi tersebut yang harus didukung oleh setiap SKPD agar arah pembangunan dapat terarah dengan baik. Untuk itu kecamatan Alalak mengacu pada sasaran yaitu :

Sasaran 8.

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika

Strategi :

- a. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel
- b. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan
- c. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
- d. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah
- e. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan system manajemen kinerja pemerintahan daerah

Sasaran 9.

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Strategi :

- a. Peningkatan kerukunan dan wawasan kebangsaan masyarakat
- b. Peningkatan penegakan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

SKPD Kecamatan Alalak berdasarkan telaahan RTRW tidak memiliki potensi kajian lingkungan berdasarkan KLHS pada RPJMD, isu prioritas berkelanjutan antara lain :

1. Penyalahgunaan nafsa
2. Perilaku hidup bersih dan sehat

3. Isu penggunaa lahan
4. Tata air kualitas, kuantitas dan kontinyulitas
5. Isu Batola sebagai lumbung pangan

Dari 5 (lima) isu diatas Kecamatan Alalak memiliki potensi kajian lingkungan berdasarkan KLHS pada RPJMD, yaitu isu untuk mengendalikan nafsa dan perilaku hidup sehat.

Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang untuk itu kecamatan alalak menurut RTRW kabupaten Barito Kuala diperuntukkan untuk kawasan pemukiman/perumahan, perdagangan/bisnis baru, industri, pertanian dan perkebunan, jasa dan pelayanan umum.

a. Kawasan Pengembangan Perumahan

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin, kecamatan Alalak memiliki lahan yang potensial untuk dijadikan kawasan pemukiman sehingga mengundang banyak pengembang berusaha ditempat ini. Didukung pembangunan jalan lingkar utara dan peningkatan fasilitas air bersih, kedepannya diharapkan perkembangan perumahan akan semakin pesat.

Perumahan merupakan kegiatan yang paling banyak memerlukan penyediaan ruang dalam penggunaan kota. Penyediaan ruang sarana perumahan didasarkan pada arah perkembangan kota yang diharapkan serta didasari oleh kebutuhan ruang bagi penduduk di masa mendatang dapat terpenuhi dan tata ruang yang kompak dapat tercapai.

Perkembangan perumahan di kawasan handil bakti sampai saat ini umumnya berada pada lapis kedua jaringan jalan trans Kalimantan dan banyak muncul pemukiman formal yang dikembangkan oleh para pengembang.

b. Kawasan Perdagangan Bisnis Baru

Kawasan Handil Bakti yang merupakan bagian depan dari daerah penyangga (buffer area) ibukota provinsi Kalimantan Selatan dan sekaligus daerah lintas ruas jalan trans Kalimantan sangat prospektif sebagai kawasan bisnis baru dengan pasar Handil Bakti sebagai pusat perkembangannya.

Tumbuhnya usaha perdagangan disepanjang koridor jalan, terutama jalan trans Kalimantan. Usaha tersebut berupa toko, kios kecil, warung bahkan rumah toko/ruko dan jasa

seperti kantor notaris. Perdagangan dan jasa tidak lepas dari peran jalan trans Kalimantan sebagai aksesibilitas pintu masuk kota Banjarmasin dan aksesibilitas menuju Kalimantan tengah.

Pesatnya perdagangan dan jasa merupakan tolak ukur bangkit dan tumbuhnya suatu wilayah dan penduduk, menuntut untuk kedepannya perlu perencanaan yang komprehensif, dimana nantinya perdagangan dan jasa akibat perkembangan kota dapat menimbulkan permasalahan lingkungan.

c. Kawasan industri

Kawasan industri dan pergudangan berupa industri galangan kapal dan industri kayu. Kawasan perdagangan ini timbul akibat adanya industri-industri kecil seperti industri roti, industri galangan kapal, kerajinan, las bubut dan lain-lain. Industri yang ada masih berupa industri kecil/home industry sehingga untuk limbah yang dihasilkan tidak menjadi permasalahan bagi lingkungan sekitar dan aliran sungai.

Pengetatan penerapan aturan dibidang tata niaga usaha perikanan oleh pemerintah member dampak terhadap kelangsungan sector industri perikanan yang ada di kecamatan Alalak terutama yang ada di desa pulau sewangi dan desa pulau sugara, yang pekerjaan penduduknya sebagai pengrajin kayu, sehingga dipandang perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait untuk terobosan agar usaha sector industri perikanan mampu bertahan/survive.

d. Pertanian dan Perkebunan

Kecamatan Alalak masih terdapat lahan kosong yang masih dimanfaatkan bagi pertanian dan perkebunan, potensi pertanian berupa komoditas padi dan komoditas perkebunan yang menghasilkan produksi tinggi yaitu kelapa.

Potensi lain yaitu rawa, hutan semak dan alang-alang masih dapat dimanfaatkan atau dibudidayakan sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

e. Pelayanan Umum

Fasilitas pelayanan umum di kawasan kecamatan Alalak berupa fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintahan. Fasilitas pelayanan umum dikawasan ini berada di pusat desa dan mengelompok pada pusat-pusat pemukiman. Pemikiran tentang bagaimana untuk menata dan menjaga kelangsungan pembangunan sarana dan prasarana umum dimasa mendatang dirasa perlu mendapat perhatian lebih.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih

mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah kecamatan Alalak yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala, antara lain sebagai berikut.

3.5.1 Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik (Masih kurangnya Pelayanan Masyarakat)

- Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kecamatan Alalak sebagai agen pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kecamatan Alalak memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.
- Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:
 - a. Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
 - b. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
 - c. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- d. Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.
- e. Masih belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga.
- f. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih belum optimal.

3.5.2 Permasalahan Bidang Administrasi Desa (Masih Rendahnya Kualitas Adminstrasi Desa)

Administrasi Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

a. Administrasi Umum

Administrasi Umum adalah Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada Buku Administrasi Umum.

b. Administrasi Penduduk

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk.

c. Administrasi Keuangan

Administrasi Keuangan adalah Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan

d. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan Kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan.

e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa

Administrasi Badan Permusyawaratan Desa adalah Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD.

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan juga berasal dari analisis lingkungan eksternal yakni berbagai peluang yang mampu diciptakan maupun yang

dimanfaatkan bagi kepentingan daerah yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (MDG's), kebijakan nasional (RPJMN), kebijakan regional (Provinsi), perkembangan IPTEK, daya saing daerah dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan di Kecamatan Alalak selama lima tahun kedepan yang antara lain adalah :

3.5.3 Kebijakan Internasional

- ❖ **Komitmen tujuan MDG's;** dengan telah diadopsinya komitmen MDG's secara nasional maka tak ada pilihan lain bagi kecamatan Alalak khususnya dan kabupaten Barito Kuala umumnya kecuali turut mencermati indikator yang harus dicapai sampai akhir tahun 2022. Capaian-capaian penting itu menyangkut pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, peningkatan persamaan *gender* dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat kematian anak, antisipasi terjadinya penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya yang menjadi masalah internasional, dan memastikan keberlangsungan lingkungan (*environmental sustainability*); sesuai target yang harus dicapai.
- ❖ **Meningkatnya isu kerjasama ekonomi antar negara (perdagangan bebas)** yang berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah di daerah. Hal ini akan menjadi ancaman terhadap sektor-sektor industri (kecil, menengah, home industry) dan perdagangan regional maupun lokal apabila kualitas produk kalah bersaing dan hampir dapat dipastikan akan berakibat matinya komoditas lokal dimaksud.
- ❖ **Isu *global warming*** yang menyebabkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat di dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal sehingga aktivitas ekonomi harus selalu dalam konteks menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem lingkungan dengan baik.

3.5.4 Kebijakan Nasional

- ❖ **Isu demokratisasi** yang cenderung melebihi porsinya, dimana masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan; struktur masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik (*well-educated*) tentang demokrasi sehingga ke depan perlu diantisipasi dengan baik.

- ❖ Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Pemerintah dan masyarakat telah menyadari akan pentingnya masalah HAM dan ini terbukti dengan telah dibentuknya beberapa lembaga/institusi yang menangani HAM seperti: Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, serta LSM yang peduli dan kegiatan utamanya di bidang HAM. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat diadukan ke Komnas HAM bukan kepada aparat penegak hukum. Penghormatan kepada hak-hak individu akhir akhir ini cenderung meningkat dan diprediksi hal ini akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan.
- ❖ Isu pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan mengingat pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.
- ❖ Keterbatasan dan Naiknya harga BBMigas. Antisipasi hal ini diperlukan pengembangan energi alternatif terbarukan.
- ❖ Masyarakat sebagai Subyek pembangunan. Pengembangan Kapasitas dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam proses pembangunan

3.5.5 Kebijakan Regional

Tantangan **untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat** yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi, meliputi isu-isu strategis antara lain:

- Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal.
- Adanya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.
- Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.
- Masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-pusat pertumbuhan.

- Masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor-sektor industri terutama industri rumah tangga.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen acuan perencanaan pembangunan daerah; Semua pembangunan fisik yang menggunakan ruang harus menggunakan RTRW sebagai salah pedoman dalam penentuan lokasi dan pemanfaatan lahan. Untuk pelaksanaan RTRWK sebagai Induk harus dilengkapi dengan aturan-aturan yang lebih rinci seperti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) dan Aturan Zonasi.

❖ **Isu pada pelayanan umum yakni:**

- **Pencapaian *good cooperate government*.**

“*Cooperate Government*” menjadi suatu isu dan *concern* di pemerintahan maupun lembaga publik lainnya yang serius dibicarakan akhir-akhir ini. Memaknai *good cooperate government* yang berarti menjalankan dan mengurus pemerintahan dengan baik diperlukan suatu upaya luas terkait dengan sistem perencanaan, pengaturan dan pengendalian pemerintahan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antar berbagai pihak yakni pemerintah daerah dengan pemerintahan provinsi/pusat, pemerintah dengan instansi vertikal dan lembaga lainnya (unsur muspida) di daerah, pemerintah dengan masyarakat (legislatif) serta pemerintah dengan pihak swasta. Berbagai permasalahan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik lainnya menjadi pendorong penerapan *mandatory* atau sebuah keharusan praktik *cooperate government* di segala aspek. Keberhasilan implementasi GCG sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang mendasarinya yakni: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independence*) dan kewajaran (*fairness*). Dengan diterapkannya GCG diharapkan akan dapat terus menumbuhkembangkan sikap kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah dan penilaian tersebut diharapkan akan dapat berpengaruh positif kepada kinerja pemerintah.

- **Pendidikan untuk semua (*Education for all*);**

Pendidikan sepanjang masa akan tetap menjadi isu yang selalu diperbincangkan dan menjadi perhatian serius mengingat bahwa pendidikan terkait dengan pendidikan seumur hidup (*long life education*). Pendidikan untuk semua menekankan kepada aksesibilitas dan pemerataan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat baik usia sekolah maupun masyarakat di luar usia sekolah yang secara umum bertujuan selain

dapat menekan angka putus sekolah juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan pendidikan anak usia dini; peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat kurang mampu; pemenuhan belajar bagi semua pemuda dan dewasa untuk pembelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup; pemberantasan buta aksara; mencapai kesetaraan jender dalam pendidikan dan meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan serta menjamin keunggulan untuk semua.

- **Peningkatan *kualitas derajat kesehatan masyarakat***

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam membangun unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, mampu bersaing di era yang penuh tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Derajat kesehatan dapat memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai permasalahan kesehatan masih banyak ditemukan yang umumnya adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan belum maksimalnya jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana kesehatan, terbatasnya serta rendahnya kualitas tenaga kesehatan, belum optimalnya manajemen operasional dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung. Kesemua ini menjadi isu strategis yang perlu mendapat porsi perhatian yang lebih dan akan tetap menjadi fokus utama pembangunan di tahun-tahun mendatang.

- **Penanggulangan kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi isu utama dan menjadi prioritas dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir. Kemiskinan yang melanda masyarakat terutamanya adalah kemiskinan ekonomi sehingga masyarakat miskin sulit untuk memperoleh akses pelayanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan upaya konkrit dan terintegrasi melalui kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta berbagai pihak (*working together to reduce poverty*) yang diharapkan akan dapat mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin.

3.5.6 Isu Daerah

- Peningkatan produktivitas padi Kecamatan Alalak menjadi hal yang mutlak dalam rangka peningkatan pendapatan petani hal ini didukung besarnya produksi padi yang tinggi harus dikombinasikan dengan inovasi teknologi, manajemen pascapanen, dan pemasaran yang baik.
- Kecamatan alalak merupakan pintu masuk ke Kabupaten Barito Kuala dalam kawasan strategis dimana Kabupaten Barito Kuala termasuk pengembangan kota metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala dan Tanah Laut).
- Sungai Barito merupakan jalur transportasi utama usaha pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan, juga memberikan manfaat besar bagi kegiatan perikanan dan pertanian.
- Tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) di setiap desa sebagai bagian dalam upaya mempertahankan kawasan lestari sumberdaya alam.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Alalak

Pernyataan visi membuat berbagai hal transparan bagi berbagai pihak yang banyak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung. Secara amat sederhana visi adalah

padangan kedepan sebagai jawaban terhadap pertanyaan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang sekaligus penyemangat.

Adapun visi dari Kecamatan Alalak adalah “**Alalak Harat (Handal Melayani Masyarakat)**”.

Agar visi terwujud maka harus mempunyai misi yang jelas, dengan cara apa, mengapa wujud dari keinginan ke depan yang sudah dicanangkan lewat pada visi. Adapun misi kecamatan Alalak Kecamatan Alalak adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
4. Meningkatkan Pembinaan Administrasi Desa.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Alalak

1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja dengan Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Meningkatkan Tertib administrasi Desa dengan Indikator Tujuan Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Alalak periode 2017–2022 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

b. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, adapun Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dari kecamatan Alalak periode 2017-2022 adalah:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik

Tabel 4.1
 Tujuan , Sasaran Program dan Indikator Program Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Alalak
ESELON III

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan Indikator Program	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat .	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey IKM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat .	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey IKM	86	87	88	89	90
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	80	80	80	80	80

Tabel 4.2
Tujuan , Indikator dan Sasaran Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Alalak
ESELON IV

No	Tujuan	Indikator	Sasaran Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Perhitungan Indikator Kegiatan	Target Kinerja (%)				
								2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Kepuasan Masyarakat .	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang sesuai SOP	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP /Jumlah Pelayanan yang ditangani x 100 %	86	87	88	89	90
						Jumlah PMKS yang ditangani di Kecamatan	Jumlah PMKS yang ditangani	7.215	550	575	575	575

					Meningkatnya ketentraman dan Keteriban diKecamatan Alalak	Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan	Jumlah Perda yang ditegakkan	2	2	2	2	2
						Persentase Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif /Jumlah Poskamling yang terdata x 100%	100	100	100	100	100
					Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	35	35	35	35	35
						Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	2	2	2	2	2

					Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Kafilah MTQ Kecamatan yang dikirim ketingkat Kabupaten	Jumlah Kafilah MTQ Kecamatan yang dikirim ketingkat Kabupaten	35	35	35	35	35
					Meningkatnya peran serta wanita dalam kesetaraan gender	Jumlah Peserta wanita yang aktif dalam kesetaraan Gender	Jumlah Peserta wanita yang aktif dalam kesetaraan gender	200	200	200	200	200
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi yang	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah desa yang administrasi pemerintahan desa yang baik	13	13	13	13	13

		tepat waktu		i Desa Yang baik		Jumlah Desa dengan Dokumen Perencanaan yang tepat waktu	Jumlah Desa dengan dokumen Perencanaan yang tepat waktu	15	15	15	15	15
						Jumlah Desa yang menyusun APBDesa yang tepat waktu	Jumlah Desa dengan dokumen Perencanaan yang tepat waktu	13	13	13	13	13

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Alalak

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Alalak. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Alalak Tahun 2017–2022 sesuai dengan misi Kabupaten Barito Kuala disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Kabupaten Barito Kuala 2017-2022			
Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)			
MISI :			
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani (4)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan sistem dan fasilitasi dalam pelayanan umum kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan publik. - Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi lintas sector Kecamatan

Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Mengoptimalkan fasilitas yang ada di Kecamatan dalam Pengendalian dan pembinaan Desa di Kecamatan Alalak	- Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan Desa. - Peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan.
---------------------------------------	--	--	---

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi desa
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan pada setiap desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan.

b. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Alalak dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah
3. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan Desa
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor kecamatan

Keterkaitan antara visi dan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama, serta strategi dan arah kebijakan akan diuraikan pada tabel 5.1 pada lampiran ini :

Tabel 5.2

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target dan Kinerja Kecamatan Alalak

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Target kinerja pada Tahun ke-				
							1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021
Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)	1. Mewujudkan peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86	87	88	89	90
	2. Mewujudkan Peningkatan Tertib Administrasi Desa	2. Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.	2. 1. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Persentase	0	80	80	80	80	80

Tabel 5.3

TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ALALAK 2017 – 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	T A R G E T				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Kepuasan Masyarakat .	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat .	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	1. Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	85	86	87	88	89	90
					2. Jumlah PMKS yang ditangani di kecamatan	7.215	7.215	550	575	575	575
				Meningkatkan ketentraman dan ketertiban diKecamatan Alalak	1. Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan	0	0	2	2	2	2
					2 Persentase Poskambling yang aktif	100	100	100	100	100	100

				Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	1. Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	35	35	35	35	35	35
					2. Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bakti	2	2	2	2	2	2
				Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama	1. Jumlah Kafilah MTQ Kecamatan yang dikirim ketingkat Kabupaten	35	35	35	35	35	35
				Meningkatkan Peran Serta wanita dalam kesetaraan gender	1. Jumlah Peserta wanita yang aktif dalam kesetaraan gender	200	200	200	200	200	200
Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi yang benar dan tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.	Persentase Desa dengan Administrasi desa yang baik.	Meningkatkan kualitas administrasi desa	1. Jumlah desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik	0	13	13	13	13	13
					2. Jumlah desa dengan dokumen perencanaan tepat waktu	15	15	15	15	15	15

Kecamatan Alalak mengagendakan kegiatan yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 tahun untuk pencapaian visi yang dicanangkan. Secara umum menurut sifatnya program dan kegiatan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu :

5.1.1. Program dan kegiatan yang bersifat rutin.

Program dan kegiatan ini dasarnya melekat karena suatu instansi yang berperan dalam mendukung kerja administrasi, pengembangan sumber daya aparatur, sarana prasarana instansi dan pelaporan kegiatan. Pada intinya kegiatan tersebut diatas pada suatu instansi akan berjalan baik jika program dan kegiatan yang bersifat rutin ini disusun baik.

Adapun program dan kegiatan kecamatan alalak yang bersifat rutin adalah :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman Untuk Rapat dan Tamu
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pembangunan Rehab kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5. Pengadaan meubeler
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

- c. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, terdiri dari :
Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan
- d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari :
 - 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
 - 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, terdiri dari kegiatan :
Koordinasi Penanganan Gangguan Dalam Negeri dan Pelatihan Linmas.

5.1.2. Program dan kinerja Non Rutin

Program dan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi serta wewenang suatu instansi. Program dan kegiatan berkelanjutan pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 tahun agar dapat mewujudkan visi yang dicanangkan.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Alalak yang bersifat spesifik adalah :

- a. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terdiri dari kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- c. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama, terdiri dari :
MTQ tingkat kabupaten
- d. Program Peingkatan dan Peran Serta Kepemudaan, terdiri dari
Kemah Bakti Karang Taruna dan Pelaksanaan Paskibra setiap 17 Agustus serta Lomba Kreasi dan karya Ilmiah dikalangan Pemuda.
- e. Program Peningkatan Peran Serta dalam Kesetaraan Jender dalam Pembangunan terdiri dari Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
- f. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah, terdiri dari :
Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Promosi daerah dan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah.

- g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa, dan Kegiatan Monitoring, evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes serta Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa.
- h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan :
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- i. Program Peningkatan Pelayanan Publik terdiri dari Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.

5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Pada dasarnya program dan kegiatan setiap SKPD selalu yang berorientasi pada layanan publik, antara satu SKPD dengan SKPD lainnya saling punya keterkaitan, dan secara langsung maupun tidak langsung akan saling menunjang. Bersinerginya program dan kegiatan antar SKPD akan menentukan keberhasilan mewujudkan visi dari pemerintah daerah Kecamatan Alalak.

5.3. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Alalak berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Alalak disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama (Eselon III)	No.	Indikator Kinerja (Eselon IV)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang sesuai SOP

2	Persentase Desa dengan administrasi Desa yang baik	2	Persentase jumlah PMKS yang ditangani di Kecamatan
		3	Jumlah Kafilah MTQ Kecamatan yang dikirim ketingkat Kabupaten
		4	Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan
		5	Persentase Poskamling yang aktif
		6	Jumlah Desa dengan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
		7	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih
		8	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti
		9	Jumlah Desa dengan Dokumen Perencanaan yang tepat waktu
		10	Jumlah desa yang menyusun APBdesa yang tepat waktu
		11	Jumlah Peserta wanita yang aktif dalam kesetaraan Gender

5.4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Alalak adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Alalak, yang salah satu point pentingnya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sehingga diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2017 - 2022.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program-program SKPD Kecamatan Alalak untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidak berhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah, dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja SKPD Kecamatan Alalak berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon II/ SKPD/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran (output). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Alalak disusun berdasarkan indikator kinerja keluaran (output).

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola SKPD Kecamatan Alalak. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Batola. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif SKPD Kecamatan Alalak. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan dapat dilihat pada Tabel T-C. 27 berikut :

		Jumlah Peserta terkirim (orang)				Kemah Bhakti Karang Taruna	Terkirimnya Peserta	20 orang	20	3.600.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	100	23.600.000	Seksi Kesra	Kab.		
		Jumlah peserta mengikuti kegiatan Paskibra kecamatan (orang)				Pelaksanaan Pelatihan Paskibra	Terlathinya dan terlaksananya Paskibra dalam pelaksanaan Upacara HUT Kemerdekaan RI	35 orang	35	33.325.000	35	60.000.000	35	60.000.000	35	60.000.000	175	273.325.000	Seksi Pemerintahan	Kab.		
						Lomba Kreasi dan karya Ilmiah dikalangan Pemuda	Jumlah peserta atak diyang yang dikirim	2 orang			2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000	Seksi Kesra	Kab.		
	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah peserta terkirim (orang)				Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama																
						MTQ Tingkat kabupaten	Terikutsertakannya kafilah kecamatan alalak pada MTQ tingkat kabupaten	35 Orang	35	39.200.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	140	239.200.000	Seksi Kesra	Kab.

		Persentase menurunnya jumlah kasus gangguan keamanan				Koordinasi Penanganan Gangguan Dalam Negeri	Terlaksananya koordinasi keamanan dan ketertiban	12 laporan	12	14.470.000	12	14.470.000	12	14.470.000	12	14.470.000	60	72.350.000			
		Jumlah Perda yang dilaksanakan				Pelatihan Linmas	Jumlah anggota linmas yang terlatih		0	0	0	15.530.000	0	15.530.000	0	15.530.000	0	62.120.000			
		Lancarnya pelaksanaan kegiatan pilkada 2017				Dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum															
						Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi pilkada		0	0	0	0	0	0	0	0	2 kali	3.000.000	2 kali	3.000.000	
						Pengamanan pemilu	Terlaksananya kegiatan pengamanan Pilkada		0	0	0	0	0	0	0	0	204 orang	111.190.000	204 orang	111.190.000	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah responden yang mengisi kuesioner		377		377	10.000.000	377	10.000.000	377	10.000.000	1500 responden	40.000.000			
						Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Aplikasi Sakti Kecamatan Alalak)				12		60.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48 bulan	90.000.000			

	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Prosentase Penyelesaian administrasi dan pelayanan masyarakat tepat waktu				Pelayanan Administrasi Perkantoran														
						Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya bahan pos, materai	1090 lbr	1090	36.270.000	1090	36.270.000	1090	36.270.000	1090	36.270.000	5450	181.350.000	kecamatan dan kelurahan	kecamatan Alalak
						Penyediaan jasa komunikasi sumber daya telepon, air dan listrik	Tersedianya biaya pembayaran air, listrik, internet dan telepon kantor, rumah dinas Camat dan 3 Kelurahan	48 bln	48	33.240.000	48	33.240.000	48	33.240.000	48	33.240.000	240	166.200.000	kecamatan dan kelurahan	kecamatan Alalak
							Pemasangan Instalasi air untuk Kelurahan Berangas dan Kelurahan Berangas Barat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas	Tersedianya jasa perpanjangan STNK mobil dinas dan kendaraan dinas kecamatan dan 3 Kelurahan	belum terlaksana	16	3.300.000	16	3.300.000	16	3.300.000	16	3.300.000	80	16.500.000		

						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian	84 eksamplar	84	6.540.000	84	6.540.000	84	6.540.000	84	6.540.000	84	6.540.000	420	32.700.000	kecamatan dan kelurahan	
						Penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu	Tersedianya snack, makanan dan minuman untuk pegawai	18634 porsi	18634	31.762.500	18634	31.762.500	18634	31.762.500	18634	31.762.500	18634	31.762.500	93170	158.812.500	kecamatan dan kelurahan	
							Tersedianya makanan dan minuman rapat 11 Kali		925	11.562.500	925	11.562.500	925	11.562.500	925	12.182.500	693	9.707.500	4393	56.577.500	kecamatan dan kelurahan	
							Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, selama 11 bulan		640	8.000.000	640	8.000.000	640	8.000.000	250	5.000.000	250	5.000.000	2420	34.000.000	kecamatan dan kelurahan	
							Tersedianya makanan dan minuman kegiatan Kecamatan dan 3 Kelurahan		860	9.025.000	860	9.025.000	860	9.025.000	855	17.100.000	855	17.100.000	4290	61.275.000	kecamatan dan kelurahan	

						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja ke luar daerah luar propinsi	90 OK	75	43.047.000	75	43.047.000	75	43.047.000	75	43.047.000	75	43.047.000	375	215.235.000	kecamatan dan kelurahan	
							Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam propinsi (Kecamatan dan 3 Kelurahan),		15	21.420.000	15	21.420.000	15	21.420.000	15	21.420.000	15	21.420.000	75	107.100.000	kecamatan dan kelurahan	
						Peyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Terbayarnya upah tenaga harian lepas petugas administrasi kantor	3 orang	4	13.200.000	4	13.200.000	4	13.200.000	4	13.200.000	4	13.200.000	20	66.000.000		
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi, terkait dengan topoksi Kecamatan ke desa dan Kabupaten	1280 OH	1280	66.370.000	1280	66.370.000	1280	66.370.000	1280	66.370.000	1280	66.370.000	6400	331.850.000		

		Jumlah sarana dan prasarana kerja (jenis)					Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan apratur secara optimal		kecamatan dan kelurahan														
							Pengadaan tanah Gedung kantor kelurahan Berangas	Tersedianya pembangunan gedung kantor kelurahan Berangas(10x30)	0	0	300 M2	120.000.000	0	-	0	-	0	-	300 M2	120.000.000				
							Pembangunan Gedung kantor	Tersedianya pembangunan gedung kantor kelurahan Berangas(9x30)	0	0	0	-	270 M2	1.350.000.000	0	-	0	-	270 M2	1.350.000.000				
							Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat (mobil patroli)	1	4	80.500.000	5	330.500.000	0	-	0	-	0	-	9	411.000.000			
							Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya almari arsip, jam dinding, karpet sholat, kompor gas+tabung, plang ruangan	6		10.960.000	6	22.300.000	4	26.250.000	0	0	0	0	0	16	59.510.000		

						Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sound system Laptop, TV, Kulkas, AC,PC,Pemotongan Rumpuk, Kipas Angin,UPS, Stavolt,LCD, Printer, Genset		0	0	13 jenis	344.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 jenis	344.350.000			
						Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas Camat	Tersedianya spring bad, lemari pakaian, lemari hias, meja wastapel / tempat cuci piring, meja dapur, rak piring		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi kerja (5 buah),Meja Kerja (5 Buah), sofa 3 set.		4 jenis	18.739.000	3 jenis	28.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 Jenis	47.239.000		
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya rehab dan pengecatan dinding kantor Handil Bakti		0	0	750M2	150000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 M2	1.500.000.000		
							Terlaksananya perbaikan Atap kantor Kelurahan Handil Bakti, Berangas				850 M2	850000000									850 M2	850000000			

						Terlaksananya Rehab Dinding/Plafon		0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0			
						Terlaksananya belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0			
						Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya service untuk kendaraan roda 4	1 kali	750.000	1 kali	750.000	1 kali	750.000	3 kali	750.000	3 kali	750.000	9 Kali	3.750.000			
							Tersedianya service untuk kendaraan roda 2	7 buah	7	800.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.620.000	4	1.500.000	23	6.920.000		
							Tersedia suku cadang kendaraan dinas roda 4	1 buah	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	2	1.800.000	2	1.800.000	7	14.400.000		
							Tersedia suku cadang kendaraan dinas roda 2	4 buah	4	1.080.000	4	1.080.000	4	1.080.000	9	1.380.000	15	2.580.000	36	7.200.000		
							Tersedianya BBM / Oli pelumas	1 buah	1	5.280.000	1	5.280.000	1	5.280.000	1	13.041.000	1	10.377.000	5	39.258.000		

						Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya perbaikan peralatan kantor	5 jenis	5	8.125.000	8	8.725.000	8	8.725.000	8	8.725.000	8	8.725.000	37	43.025.000			
						Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman	Tertatanya pagar dan pintu gerbang untuk halaman kantor kecamatan alalak (150m) dan Kelurahan Handil Bakti (30m)		0	0	180 M	380.000.000	0	0	0	0	0	0	0	180 M	380.000.000		
						Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman	Tertatanya taman untuk halaman kantor kecamatan alalak (m2)		0	0	40 M2	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40 M2	40.000.000		
		Jumlah PNS yang mengik uti diklat aparatur				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
						Terdidik dan terlatihnya pegawai dengan mengikuti bimbingan teknis, seminar, workshop kursus dan diklat	Terkirimnya Peserta Bimtek	7 OK	2	20.000.000	7	67.000.000	7	67.000.000	7	67.000.000	7	67.000.000	30	288.000.000		Luar Prov, luar daerah dan dalam daerah	

		Persentase pelaporan sesuai kebutuhan dan tepat waktu.				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Realisasi Fisik Keuangan (RFK) SKPD Kecamatan Alalak dan Lakip dan tersampaikan tepat waktu	13 JUDUL	13	175.500	13	215.500	13	215.500	13	215.500	13	215.500	65	1.037.500		
						Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran dan tersampaikan tepat waktu		1	117.500	1	117.500	1	117.500	1	117.500	1	117.500	5	587.500		
						Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun dan tersampaikan tepat waktu		1	171.000	1	171.000	1	171.000	1	171.000	1	171.000	5	855.000		

					Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (DAU Tambahan)	Jumlah peserta pelatihan kader posyandu	20 orang			20	13.440.000	20	13.440.000	20	13.440.000	80	53.760.000	Kel. Berangas Barat		
					Program Penanggulangan Kebakaran															
					Pelatihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran (DAU Tambahan)	Jumlah peserta Pelatihan Siaga Bencana	20 orang			20	6.220.000	20	6.220.000	20	6.220.000	20	6.220.000	80	24.880.000	Kel. Berangas Barat
					Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku															
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (DAU Tambahan)	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan air Bersih	20 orang			20	6.220.000	20	6.220.000	20	6.220.000	20	6.220.000	80	24.880.000	Kel. Berangas Barat

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Alalak mempunyai Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T.C. 28.

Tabel T-C. 28.

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah) Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	95	95	95	95	95
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	60	60	65	70	75	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Alalak 2017 -2022 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan Pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Alalak.

Dengan Melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kecamatan Alalak diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Rencana Strategis ini merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi dan masyarakat Kecamatan Alalak untuk dijadikan sebuah acuan pedoman bagi seluruh komponen yang ada di Kecamatan Alalak untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-sehari, merupakan landasan bagi perencanaan strategis tahap berikutnya.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.